

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari enam aspek yang menjadi deskriptor evaluasi kebijakan, seluruhnya belum terpenuhi secara optimal, baik pada aspek efektifitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, perataan dan responsivitas. Permasalahan utama yang menjadi belum optimalnya kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Sumatera Barat adalah belum dilakukannya proses uji/simulasi serta *review* terhadap dokumen tersebut secara periodik dan merujuk kepada ketentuan yang berlaku. Secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pada aspek efektifitas, rencana kontinjensi Tsunami Sumatera Barat diragukan kesiapan dalam dokumen penanggulangan bencana tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum mengalami *proses review* untuk menyesuaikannya dengan ancaman dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan.

Kedua, pada aspek efisiensi kebijakan, intervensi yang dilakukan untuk mencapai tujuan belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan sumber daya yang ada belum terdata dan terkelola dengan baik. Belum semua pemangku kepentingan yang dilibatkan karena terbatasnya waktu dan anggaran, sehingga kewajiban untuk pendataan dan pengelolaan sumber daya untuk kebutuhan tanggap darurat bencana belum dilakukan dengan baik dan akurat. Ketiga, aspek kecukupan dalam kebijakan masih belum terpenuhi oleh para pemangku kebijakan yang terkait. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya dan kesenjangan

dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana serta ketika kebijakan ini secara ketetapan menjadi rencana operasi saat terjadi bencana.

Keempat, pada aspek ketepatan kebijakan belum tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa poin utama yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan belum terpenuhi berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan. Kelima, pada aspek pemerataan dalam masih belum terpenuhi oleh para pemangku kebijakan yang terkait. Hal ini dapat dilihat bagaimana alokasi sumber daya dan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan yang relevan belum dilakukan secara optimal. Dan terakhir, pada aspek responsivitas yaitu yang berfokus pada permasalahan krusial dan intensitas preferensi, berdasarkan temuan penelitian belum dilaksanakan dalam kebijakan rencana kontinjensi Tsunami Sumatera Barat.

Kesimpulan dari penelitian ini secara substansif bahwa kebijakan rencana kontinjensi berorientasi untuk memastikan penanggulangan bencana secara efektif kedepannya. Namun demikian pada kebijakan tersebut perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif dan dilakukan proses uji melalui berbagai skema. Selanjutnya mesti ditindaklanjuti dengan melakukan proses *review* untuk memastikan kesiapan rencana kontinjensi ketika terjadi bencana.

Secara teoritis, kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi kebijakan khususnya di bidang penanggulangan bencana dengan menggunakan konsep dan indikator/deskriptor evaluasi kebijakan publik sebagai pisau analisis terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk rekomendasi kebijakan berbasis riset

(*research based policy*) kepada pemangku kepentingan yang relevan untuk memperbaiki dan memperbaharui kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang ada saat ini.

Lebih lanjut, rencana kontingensi dilakukan untuk membantu mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat dan efektif. Perencanaan kontingensi juga memastikan kemampuan sumberdaya yang tersedia dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa.

Oleh karena itu sebagai sebuah kebijakan rencana kontinjensi diperlukan proses *review* atau pembaharuan secara periodik agar sesuai dengan kondisi terkini. Evaluasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menilai bahwa dokumen rencana kontinjensi yang berlaku sudah tidak mewakili kondisi terkini.

## **6.2. Saran-Rekomendasi**

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa konten kebijakan yang disarankan untuk diperbaiki seperti pada aspek konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan rencana kontinjensi tsunami perlu diperkuat dengan kewajiban untuk dijadikan sebagai acuan bagi daerah dalam bentuk regulasi yang mewajibkan seluruh pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana menjadikan rencana kontinjensi sebagai panduan wajib untuk pelaksanaan operasional tanggap darurat bencana.

Pada aspek keterlibatan pemangku kepentingan dalam kebijakan, sudah semestinya melibatkan pemerintah nagari/kelurahan bersama masyarakat sebagai bentuk mengakomodir kearifan lokal di Wilayah Sumatera Barat, yang pada saat dokumen rencana kontinjensi tsunami ini dirancang belum dilibatkan. Padahal faktanya pemerintah nagari/kelurahan bersama unsur masyarakat merupakan unsur yang penting dalam upaya penanggulangan bencana untuk dapat berjalan optimal.

Secara substansi, Kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami sudah semestinya dilakukan pembaharuan dikarenakan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang ada saat ini sangat mungkin ada perubahan dan pergeseran dari sebelumnya. Oleh karena itu, secara praktis disarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *leading sector* disarankan untuk melakukan proses uji rencana kontinjensi Tsunami yang dilanjutkan dengan proses *review* sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaharui dokumen agar relevan dengan resiko, ancaman, ketersediaan dan kebutuhan sumber daya.

Proses uji dan *review* tersebut sebagai metode evaluasi untuk memastikan kelayakan dan kesiapan rencana kontinjensi Tsunami Sumatera Barat mesti melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana termasuk di dalamnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Direkomendasikan penyusunan kebijakan rencana kontinjensi Tsunami tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sumatera Barat, agar terjadi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta menghindari tumpang tindih pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Untuk itu, dibutuhkan

komitmen dari pimpinan daerah baik pada level kepala daerah dan jajaran pimpinan agar memprioritaskan program dan anggaran untuk kegiatan pengurangan resiko bencana salah satunya dengan rutin melakukan uji/latihan/simulasi khususnya pada rencana kontinjensi Tsunami untuk memastikan kesiapan menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.

Secara teoritis, penelitian ini perlu dikembangkan dengan menggunakan konsep evaluasi kebijakan lainnya dan konsep kebijakan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif untuk menjadi alat analisis pada temuan penelitian. Diperlukan konsep ataupun teori lain yang dapat menyentuh konsep *local wisdom* dan lini pemerintahan terkecil seperti pemerintahan nagari dan masyarakat dalam menghadapi bencana Tsunami. Penelitian lebih lanjut juga disarankan menggunakan metode dan pendekatan yang lebih luas seperti penelitian kebijakan dan metode *research and development* untuk merancang desain/model kebijakan penanggulangan bencana yang lebih aplikatif dan solutif agar dokumen Rencana Kontinjensi yang telah disusun mudah untuk disosialisasikan dan dipakai sebagai rencana operasi dalam masa tanggap darurat bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat.